

Laporan Kinerja TRIWULAN I Tahun 2024



**DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Jasa Kelautan Triwulan I Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan selama Triwulan I Tahun 2024 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 24 April 2024

Direktur Jasa Kelautan



Dr. Miftahul Huda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPRL terdiri atas 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK), total 18 indikator.

Semua indikator kinerja Triwulan I Tahun 2024 yang tercapai dengan baik, melebihi target dan kurang dari target dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 5% tercapai 2,75% atau sebesar 55%,
2. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
3. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 94% tercapai 133,33% atau sebesar 120%,
4. IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target 80% tercapai 99% atau sebesar 120%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN	5
1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	5
1.2. PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JASA KELAUTAN. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	5
1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JASA KELAUTAN 2024	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
3.1.1. IKU 1 PERSENTASE PENDATAAN PERGARAMAN YANG DILAKSANAKAN (%).....	14
3.1.2. IKU 2 TENAGA KERJA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN (ORANG)	17
3.1.3. IKU 3 NILAI PNBP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (RP).....	18
3.1.4. IKU 4 SARANA PRODUKSI BIOFARMAKOLOGI YANG DIBANGUN (UNIT).....	20
3.1.5. IKU 5 LOKASI YANG TERFASILITASI PEMANFAATAN PESISIR DAN LAUT YANG DIKELOLA UNTUK BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT (LOKASI)	21
3.1.6. IKU 6 LOKASI YANG TERFASILITASI PENGELOLAAN REKLAMASINYA (LOKASI)	26
3.1.7. IKU 7 LOKASI YANG TERFASILITASI PENGELOLAAN PERAIRAN (LOKASI).....	29
3.1.8. IKU 8 SARANA/PRASARANA DI SENTRA EKONOMI GARAM YANG DIBANGUN (UNIT).....	29
3.1.9. IKU 9 LAHAN GARAM RAKYAT YANG DIFASILITASI (HA)	32
3.1.10. IKU 10 KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA WISATA BAHARI (KAWASAN)	33
3.1.11. IKU 11 KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA BMKT (KAWASAN)	38
3.1.12. IKU 12 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%).....	39
3.1.13. IKU 13 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (INDEKS)	40
3.1.14. IKU 14 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI).....	42
3.1.15. IKU 15 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (DOKUMEN)	44
3.1.16. IKU 16 PERSENTASE UNIT KERJA LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR (%).....	45
3.1.17. IKU 17 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN (%).....	46
3.1.18. IKU 18 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%)	47
3.1.19. IKU 19 TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%)	49
3.1.20. IKU 20 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI)	51
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	53
BAB IV PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	9
Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang) Triwulan I Tahun 2024.....	17
Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan	18
Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan I Tahun 2024 ..	19
Tabel 4 capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)	20
Tabel 6 capaian IKU <i>Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut</i>	22
Tabel 7 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)	27
Tabel 8 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi).....	29
Tabel 9 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)	31
2.1.11. Tabel 10. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan).....	33
Tabel 12. Capaian IKU <i>Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)</i>	38
Tabel 14. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan.....	39
Tabel 15. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks).....	41
Tabel 16. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)	43
Tabel 17. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	44
Tabel 18. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).....	46
Tabel 19. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	47
Tabel 20. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	48
Tabel 21. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).....	50
Tabel 22. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).....	53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. *Penjelasan Umum Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Direktorat Jasa Kelautan memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pendayagunaan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

1.2. *Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan. Aspek Strategis Organisasi*

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan adalah sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Terkait permasalahan garam, saat ini masih dibutuhkan sarana/prasarana pengembangan usaha garam yang memadai terutama di wilayah timur Indonesia karena wilayah ini sangat potensial dikembangkan usaha garam rakyat.
3. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimal 3A (atraksi, amenities/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.
4. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
5. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
6. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
7. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;

8. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
9. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
10. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
11. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2024

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Terlaksananya Pendataan Pergaraman dengan indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa Kelautan (orang)
3. Sasaran Strategis Ketiga (SS-3): Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000):
4. Sasaran Strategis Keempat (SS-4): Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (Unit):
5. Sasaran Strategis Kelima (SS-5): Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi):
6. Sasaran Strategis Keenam (SS-6): Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)
7. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-7): Terfasilitasinya Pengelolaan Perairan dengan Indikator Kinerja Utama;
 - a. Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan Perairan (Lokasi):
8. Sasaran Strategis Kedelapan (SS-8): Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana/Prasarana Garam Yang Dibangun (Unit)
9. Sasaran Strategis Kesembilan (SS-9): Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi dengan Indikator Kinerja Utama;
 - a. Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)

10. Sasaran Strategis Kesepuluh (SS-10): Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan);
 - b. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)
11. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-11): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Jasa Kelautan (%)
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)
 - c. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)
 - d. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)
 - e. Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
 - f. Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
 - g. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)
 - h. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).
 - i. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan yang terdiri dari 11 (sebelas) IKU dan 9 (sembilan) IK.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	390
3.	Meningkatnya Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan	3.	Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan (Rp.000)	100.000.142
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31
9.	Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi	9.	Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)	75
10.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	10.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8
		11.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	12.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	88

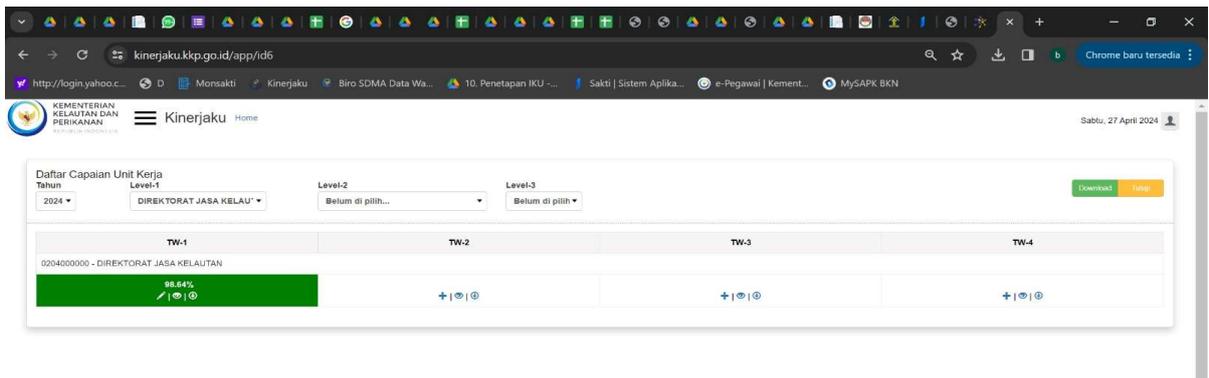
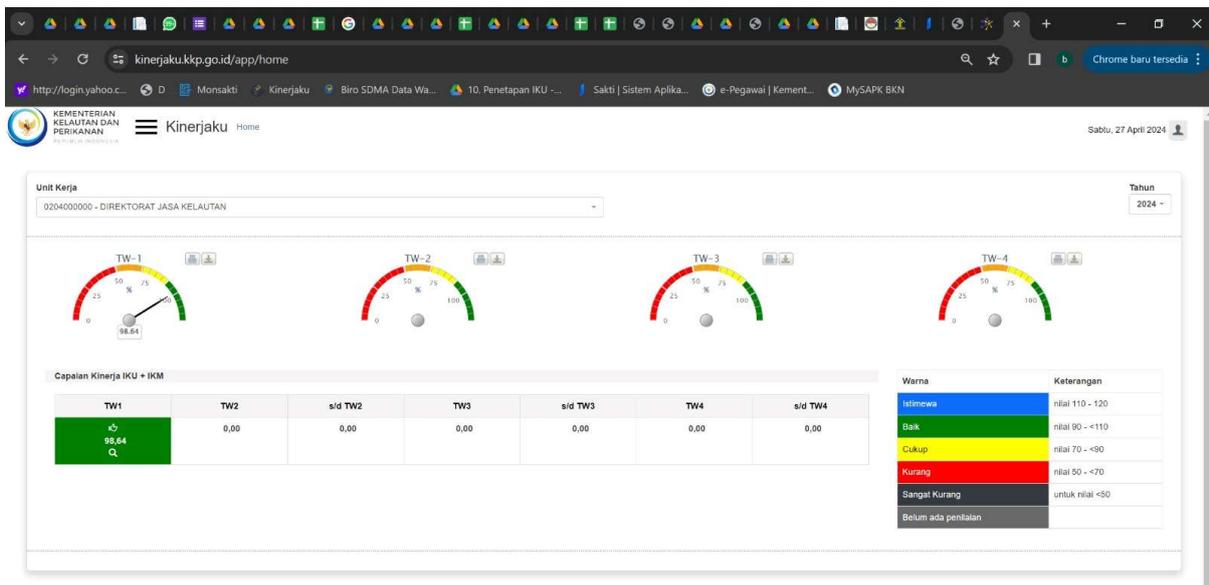
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	81
		15. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		16. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		17. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		18. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		19. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	80
		20. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024 adalah 98,64 (*baik*) untuk IKU dan IK pada aplikasi kinerjaku.



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN	%
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100	-	-	-
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	390	-	-	-
3.	Meningkatnya Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan	3.	Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan (Rp.000)	100.000.142	-	-	-
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2	-	-	-
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3	-	-	-
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5	-	-	-
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3	-	-	-
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31	-	-	-
9.	Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang	9.	Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)	75	-	-	-
10.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	10.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8	-	-	-
		11.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2	-	-	-
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	12.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95	5	2,75	55,0
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	88	-	-	-
		14.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	81	-	-	-
		15.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4	1	1	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW I	CAPAIAN	%
	16.	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33	120
	17.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	80	99	120
	18.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100	-	-	-
	19.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	80	-	-	-
	20.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75	-	-	-

3.1.1. IKU 1 Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)

Data statistik sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya data pergaraman nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina petambak garam rakyat sangat membutuhkan data produksi garam dan data pokok kegiatan pergaraman rakyat lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tersebut, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bekerjasama dengan Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Statistik Industri. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga ini tidak hanya menghasilkan data pokok pergaraman nasional tetapi juga bertujuan untuk menyempurnakan metodologi dan tata cara pendataan untuk mendapatkan data garam yang akan dijadikan sebagai rujukan nasional bagi pengembangan usaha garam rakyat. Disamping itu juga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia khususnya di sektor pergaraman nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Survei Produksi Garam Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari survei yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan akan menghasilkan data produksi usaha garam rakyat beserta karakteristiknya yang lebih lengkap. Hal ini sangat penting sebagai informasi bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Selain itu diharapkan hasil survei ini dapat bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan pada usaha garam.

Secara umum tujuan kegiatan pendataan garam adalah untuk mendapatkan data produksi garam rakyat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan usaha garam rakyat. Secara khusus tujuan pendataan garam adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data produksi garam rakyat secara nasional,
- b. Mengetahui karakteristik usaha garam, antara lain:
 - Penjualan garam
 - Stok akhir garam
 - Harga garam
 - Rata-rata lama pengkristalan
 - Jumlah pekerja di sektor garam

Pencacahan dilakukan secara sampel survei dimana hanya sebagian dari petambak garam yang akan menjadi obyek survei. Dalam kegiatan pencacahan, metode sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling*. Sampel dipilih dari kerangka sampel (*List Frame*) yang merupakan hasil listing kegiatan pendataan garam pada tahun 2020 yang dilakukan update dengan hasil kegiatan survei garam tahun 2021.

Alokasi sampel dihitung berdasarkan populasi petambak garam hasil pendataan tahun 2020 update tahun 2021. Penarikan sampel dilakukan secara sistematis. Jumlah sampel terpilih ditentukan dengan menggunakan rumus pengalokasian untuk memperoleh *minimal sample size* dengan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 5% pada tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel terpilih tersebar di 13 provinsi dan 66 kabupaten/kota. Diharapkan dari sampel tersebut dapat menduga produksi dan karakteristik pokok lainnya terkait usaha garam rakyat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Selain penyusunan data produksi garam, IKU ini juga mencakup penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam serta survei harga dan perhitungan NTPG.

Informasi Geospasial Lahan Garam merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdiri dari atas 2 (dua) produk yaitu IG Lahan Garam dan Informasi IG Gudang Garam. Spesifikasi yang diatur dalam IG Lahan Garam mulai dari identifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan portrayal/visualisasi data.

Teknik Menghitung:

(pendataan pergaraman yang dilaksanakan / jumlah pendataan pergaraman yang direncanakan) * 100%

Tabel 1. Capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan Triwulan IV Tahun 2023

SS - 1		Terlaksananya Pendataan Pergaraman											
IKU - 1		Persentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	

100	100	-	Periode pengukuran Tahunan	100	-	100	100	100	100
-----	-----	---	----------------------------	-----	---	-----	-----	-----	-----

Perhitungan capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman dilakukan secara tahunan dan pada triwulan I ini belum ada capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra.

Analisis **Keberhasilan** pencapaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2024 didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni:

1. Tersusunnya hasil Survei dan kuesioner Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) tahun 2024,
2. Tersusunnya pedoman dan kuesioner survei NTPG Tahun 2024,

Pada pelaksanaan kegiatan ditemui **kendala** masih kurangnya responden yang memiliki catatan transaksi atau pembukuan berupa volume atau harga komoditas sehingga menghambat proses pencacahan. Disamping itu, waktu pencacahan yang bervariasi terutama bagi responden pedagang terkadang tidak sesuai dengan jam bekerja enumerator. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** yaitu enumerator menerapkan teknik probing dalam wawancara dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat serta enumerator membuat perjanjian dengan responden dalam menentukan waktu yang tepat untuk wawancara. Terdapat **efisiensi sumberdaya manusia** karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah, pada penyusunan IG Lahan Garam yaitu melibatkan staf Direktorat Jasa Kelautan untuk melakukan perbaikan hasil *quality control* sebagai masukan dari Bagian Data Setditjen PRL tanpa melibatkan pihak ketiga.

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Persentase Pendataan Pergaraman sebagai berikut:

1. Penyusunan kuesioner SPDT NTPG
2. Penyusunan pedoman survei harga NTPG tahun 2024
3. Penyusunan kuesioner survei harga NTPG tahun 2024

Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 adalah:

1. Koordinasi persiapan survei harga untuk penyusunan NTPG Tahun 2024
2. Persiapan metodologi penyusunan SDPT
3. Koordinasi persiapan pendataan produksi tahun 2024
4. Persiapan metodologi pendataan produksi garam tahun 2024



3.1.2. IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan dan melibatkan tenaga kerja adalah:

- a. Sarana/Prasarana Niaga Garam
- b. Pengembangan Wisata Bahari
- c. Pengelolaan BMKT
- d. Pengelolaan Biofarmakologi

Teknik Menghitung:

$$\text{TK. Dit Jaskel} = \text{TK.SE} + \text{TK.WB} + \text{TK.BM} + \text{TK.BF}$$

Keterangan:

- a. TK.Dit Jaskel = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan
- b. TK.SE = Sarana/prasarana Niaga Garam
- c. TK.WB = Pengembangan Wisata Bahari
- d. TK.BM = Pengelolaan BMKT
- e. TK.BF = Pengelolaan Biofarmakologi

Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang) Triwulan I Tahun 2024

SS – 2	Meningkatnya Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			
IKU – 2	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (Orang)			
Realisasi Tahun lalu	Tahun 2024*	Tahun 2024	Renstra DJPRL 2020-2024	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
1.128	897	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-

Perhitungan capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dilakukan secara tahunan menunggu selesainya pekerjaan fisik. Target IKU ini tahun 2024 adalah 390 orang, dan pada Triwulan ini belum bisa dihitung karena merupakan target tahunan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target IKU ini tidak terdapat pada renstra sehingga tidak dapat dibandingkan. Data jumlah tenaga kerja per kegiatan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan

No.	Kegiatan	TK Terlibat Langsung	TK Terlibat Tidak Langsung	Jumlah
1.	Pembangunan Sarana Niaga Garam			
2.	Pengembangan Wisata Bahari			
3.	Pengelolaan BMKT			
5.	Pengelolaan Biofarmakologi			
	Total			

Analisis efisiensi sumberdaya dalam pencapaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan tenaga kerja yang merupakan penerima bantuan, tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan sarana/prasana yang terlibat dalam kegiatan.

3.1.3. IKU 3 Nilai PNPB Direktorat Jasa Kelautan (Rp)

Dasar hukum penetapan IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jasa Kelautan (PNBP Jaskel) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Pelaksanaan/Pengelolaan Reklamasi, Kegiatan Wisata Bahari, pengangkatan BMKT, dan kegiatan pemanfaatan air laut selain energi dan Kegiatan Biofarmakologi dan Teknologi.

Teknik Menghitung:

PNBP Dit Jasa Kelautan = PNBP Reklamasi + PNBP Wisata Bahari + PNBP BMKT + PNBP Air Laut + PNBP Biofarmakologi



Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan I Tahun 2024

SS – 3		Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan											
IKU –3		Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target tahun	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
277.870,363	277.870,363	-	Periode pengukuran tahunan				12.431.094	1.362,13 atau 120% (kinerja)	-	-	-	-	

Capaian IKU PNBP dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2023 capaian IKU ini sebesar Rp. 12.431.094.000,- dari target Rp. 169.327.754.043,00 atau tercapai 1.362,13%%. Target Tahun 2024 adalah Rp.100.000.094.000,- . IKU ini tidak terdapat pada pada renstra sehingga tidak dapat dibandingkan. Sumber PNBP Direktorat Jasa Kelautan berasal dari perizinan reklamasi, penggunaan ruangan galeri BMKT, dan pemanfaatan air laut selain energi.

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam pengurusan proses perizinan berusaha diantaranya adalah:

- Keterbatasan anggaran dalam upaya penyebaran informasi terkini terkait pengelolaan perizinan berusaha lingkup jasa kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Solusi yang diambil yaitu:

- Adanya metode hybrid dalam melaksanakan kegiatan menjadi solusi dalam pencapaian output di bidang reklamasi. Metode ini menjadi salah satu cara yang diambil dalam rangka penyesuaian dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan perizinan berusaha terutama pada upaya penyebarluasan informasi terkini dari perkembangan perizinan berusaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam kegiatan perizinan berusaha lingkup jasa kelautan, yaitu digunakannya metode *hybrid* (luring dan daring) dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dengan metode ini mempermudah audiens atau stakeholder terkait maupun tim kelompok pelayanan perizinan berusaha dalam melaksanakan kegiatan jasa kelautan. Kegiatan hybrid memiliki tingkat efisiensi tinggi terutama saat pelaksanaan sosialisasi perizinan berusaha yang dapat dilakukan dengan cakupan area/wilayah yang luas tanpa harus hadir di lokasi acara dilaksanakan. Efisiensi anggaran pun dapat dilakukan dengan metode tersebut. Terlaksananya kegiatan pelayanan perizinan berusaha secara keseluruhan sesuai target dan perencanaan, kegiatan tersebut relatif efektif dan efisien dengan didukung juga pelonggaran berkegiatan dengan tetap menjaga prosedur kesehatan.

3.1.4. IKU 4 Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)

Kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang ditingkatkan kapasitasnya adalah kelompok atau koperasi yang mengolah biota laut menjadi produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya. Menghitung jumlah kelompok usaha pengolahan/ pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang terfasilitasi peningkatan kapasitas usahanya melalui bimbingan atau pelatihan diversifikasi produk atau pemasaran hasil produksinya.

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

Tabel 5 capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)

SS – 4	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi			
IKU –4				
Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2024	Renstra DJPRL 2020-2024	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
3	2	-	Pengukuran periode tahunan				100	-	2	100	2	100

Perhitungan capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun tahunan. Pada tahun 2023 dari target 2 unit dan tercapai 3 unit atau sebesar 100%. Tahun 2024 target sebanyak 2 unit dan tercapai 2 unit (100%). Pada triwulan I ini belum ada capaian sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan Renstra.

Analisis keberhasilan: Telah dilakukan survei dan identifikasi calon lokasi dan calon penerima bantuan biofarmakologi, Telah dilakukan pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PT Immortal dalam rangka kerjasama antara KKP dengan PT Immortal terkait hilirisasi produk biofarmakologi yang digarap oleh UMKM binaan KKP

Kendala penentuan calon penerima bantuan dan penetapan masih dalam proses . **Solusi** yang dilakukan adalah Mempercepat proses penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan biofarmakologi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yaitu Penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan, penggunaan sistem informasi geografis dalam tahap analisis data..

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan I, antara lain:

- a. Survey dan identifikasi calon lokasi dan calon penerima bantuan biofarmakologi.

3.1.5. IKU 5 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (lokasi)

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, dokumen bangunan laut yang dimaksud adalah NSPK dan atau hasil pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun/didokumentasikan. Pada Tahun Anggaran 2023 Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai adalah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi.

Tabel 6 capaian IKU Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut

SS - 5		Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut											
IKU - 5													
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenalkan thd TW I Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
3	3	-	-	-	-	-	3	100	3	100	3	100	

Capaian IKU ini adalah tahunan sebanyak 3 lokasi sehingga belum bisa dibandingkan dengan Capaian tahun 2023 dan Renstra.

Keberhasilan Terkait dengan rig to reef, dilakukan kerjasama dengan Korea (KIORCC) dan koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan.

Kendala Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut terlaksana sesuai dengan rencana tahunan yang telah disusun. Terkait rekomendasi kebijakan/ perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi laut KKPRL/ PKKPRL, banyaknya jumlah dokumen yang diajukan, lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan data dan peta yang memadai serta waktu penyampaian rekomendasi teknis yang singkat menjadi kendala dalam penyusunannya. Mengingat beberapa lokasi diperlukan verifikasi lapang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil maupun biaya.

Solusi : Upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait, UPT, pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi pemberian rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut dan penggunaan sistem informasi geografis untuk mengolah data base yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial.

Analisis efisiensi:

1. penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat- rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
2. Penggunaan sistem informasi geografis dalam tahap analisis data, apabila data sudah memadai, tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan
3. Penggunaan teknologi, pertemuan secara online untuk beberapa pertemuan yang bisa dilakukan secara tidak langsung

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi, kegiatan pendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

- (i) Rapat Koordinasi Task Force Tindak Lanjut Kerja Sama RI-Korea.



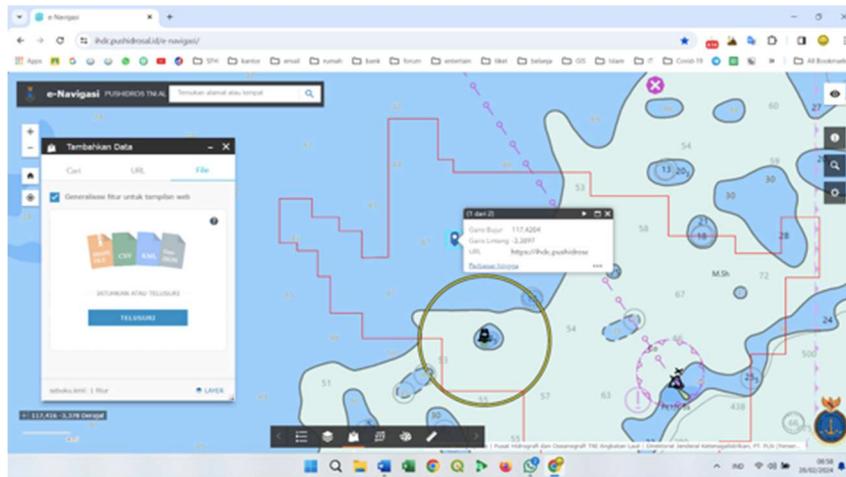
Dokumentasi Rapat Koordinasi Task Force Tindak Lanjut Kerja Sama RI-Korea tanggal 7 Februari 2024

- (ii) Focus Group Discussion Tindak Lanjut Kerja Sama RI-Korea dalam Lingkup Kerja Sama Rig Reutilization Program.



Dokumentasi Focus Group Discussion Tindak Lanjut Kerja Sama RI-Korea dalam Lingkup Kerja Sama Rig Reutilization Program tanggal 21 Februari 2024

- (iii) Focus Discussion Grup Anjungan Ruby Abandonment and Site Restoration (ASR) In-Situ Rig to Reef Mubadala Energy dalam rangka persiapan rigs to reef.



Dokumentasi Focus Group Discussion Tindak Lanjut Kerja Sama RI-Korea dalam Focus Discussion Grup Anjungan Ruby Abandonment and Site Restoration (ASR) In-Situ Rig to Reef Mubadala Energy dalam rangka persiapan rigs to reef tanggal 29 Februari 2024

(iv) Pembahasan Persiapan Monitoring Rig to Ref 2024



Dokumentasi Pembahasan Persiapan Monitoring Rig to Reef 2024
tanggal 20 Februari 2024



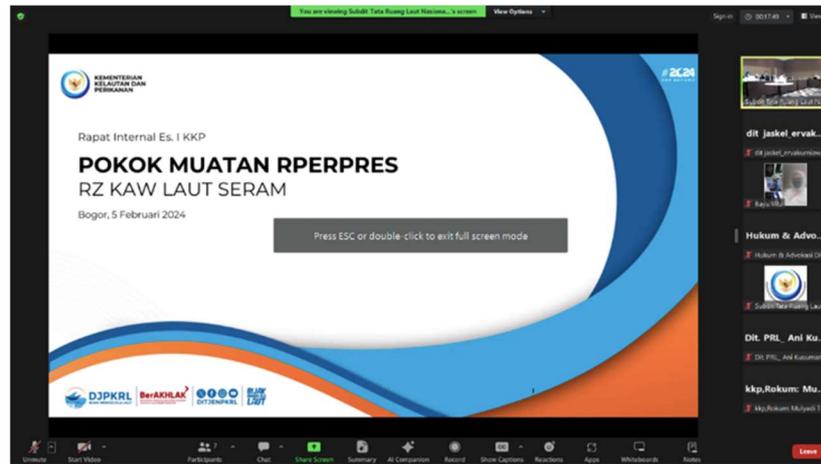
Dokumentasi Pembahasan Persiapan Monitoring Rig to Reef 2024
tanggal 22 Maret 2024

- (v) Pertemuan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Laut Banda



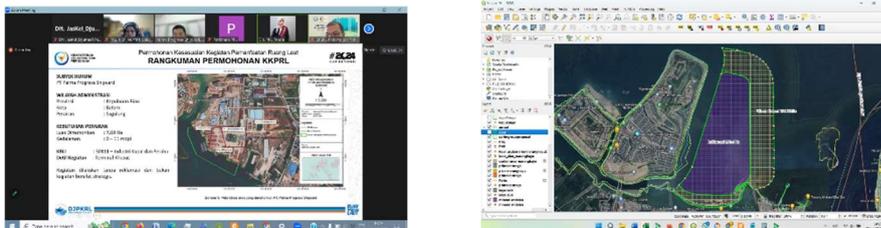
Dokumentasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Laut Banda tanggal 1 Februari 2024

- (vi) Rancangan Perpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan Rancangan PP tentang Perairan Pedalaman.



Dokumentasi Pembahasan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW di 4 (empat) lokasi tanggal 5 Februari 2024

7. Penyusunan dan penyampaian masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) yang diajukan oleh Pemrakarsa.



Dokumentasi Pembahasan Bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW di 4 (empat) lokasi tanggal 3 April 2024

3.1.6. IKU 6 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)

Definisi dari reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Fasilitasi pengelolaan reklamasi merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasi. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Pengelolaan Reklamasi mencakup kegiatan berikut, diantaranya:

- a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi
- b. Layanan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi
- c. Pengelolaan Basis Data Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi
- d. Penyusunan NSPK Pengelolaan Reklamasi.

Tabel 7 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)

SS – 6		Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi											
IKU – 6		Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	5	-	-	-	-	0	5	100	5	100	5	100	

Untuk triwulan I IKU tidak ada target disebabkan target IKU ini adalah tahunan, sehingga belum bisa dibandingkan, baik triwulan I tahun 2023 maupun dengan renstra.

I. Analisis Keberhasilan

Pengelolaan reklamasi di tahun anggaran 2024 menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi dan layanan perizinan untuk kegiatan reklamasi dan sumber material. Penyebarluasan informasi dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material dilakukan termasuk pemuktahiran informasi perihal peraturan terbaru dalam kegiatan reklamasi dan sumber material kepada pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dengan adanya penyebarluasan informasi dan upaya peningkatan pelayanan perizinan serta penyusunan basis data dalam kegiatan reklamasi dan sumber material sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan yang baik, sesuai dengan target output dan outcome dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material.

Pada layanan perizinan reklamasi dan sumber material dilakukan juga penyusunan NSPK sebagai kelengkapan dalam operasional kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material. Penyusunan NSPK ini sebagai upaya melengkapi sistem dalam pelayanan perizinan berusaha sehingga dapat mencapai target PNBPN dan pelayanan perizinan bidang Jasa Kelautan. Dilakukan juga coaching clinic dalam perizinan berusaha lingkup jasa kelautan sehingga para pelaku usaha dapat berkonsultasi dalam rangka penyiapan persyaratan untuk memohon izin pelaksanaan reklamasi.

II. Kendala

Pada Triwulan I, kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SOP yang telah disusun untuk kegiatan reklamasi dan sumber material.

III. Solusi

Pada kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material melakukan updating dan berkoordinasi dengan K/L terkait jika dihadapkan suatu kendala dalam pencapaian target output 2024.

IV. Kegiatan Pendukung

Pada Pengelolaan reklamasi dan sumber material di Triwulan I 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, yaitu:

a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi

Pada Triwulan I 2024 dilaksanakan perencanaan pelaksanaan sosialisasi reklamasi dan sosialisasi sumber material. Tim menelaah perihal audiens yang akan diundang, materi sosialisasi, lokasi-lokasi sosialisasi, dan narasumber yang akan dihadirkan dalam sosialisasi. Kegiatan lainnya sebagai pendukung kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan bimbingan teknis dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material.

b. Layanan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

Telah melaksanakan kegiatan Coaching Clinic dalam perizinan pelaksanaan reklamasi di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Plh. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Direktur Jasa Kelautan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP. Kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha yang membutuhkan informasi perihal kewenangan dan proses perizinan reklamasi yang menjadi kewenangan KKP.

c. Pengelolaan Basis Data Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi

Pada Triwulan I 2024 dilaksanakan penyusunan kegiatan lanjutan dalam pengelolaan kegiatan.

d. Penyusunan NSPK Pengelolaan Reklamasi

Pada triwulan 1 tahun 2024 ini dilaksanakan penyusunan kelengkapan dalam sistem pengelolaan reklamasi dan sumber material.

V. Rencana Aksi

Pada Triwulan II Tahun 2024, Kegiatan Pengelolaan Reklamasi merencanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target 2024, diantaranya:

1. Penyiapan materi konsultasi publik perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
2. Sosialisasi Pengelolaan Reklamasi dan sumber material
3. Verifikasi Teknis Permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi
4. Pendukung Verifikasi Lanjutan Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut
5. Penyusunan Basis Data lanjutan untuk pengelolaan reklamasi dan sumber material.

3.1.7. IKU 7 Lokasi yang Terasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)

Perizinan perairan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain kegiatan reklamasi meliputi kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan wisata bahari, kegiatan terkait bangunan dan instalasi laut, bioteknologi laut dan biofarmakologi laut, serta pengangkatan BMKT.

Fasilitasi perizinan perairan merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan usaha pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan laut dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan berupa kegiatan teknis usahanya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Fasilitasi Perizinan Perairan salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya perairan serta verifikasi perizinan pengelolaan air laut.

Tabel 8 capaian IKU Lokasi yang Terasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)

SS - 7		Terasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan										
IKU - 7		Lokasi yang Terasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)										
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100%	-	Periode pengukuran tahunan				5	5	5	5	5	5

Capaian IKU Lokasi yang Terasilitasi Pengelolaan Perairan dilakukan secara tahunan sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun Renstra.

Analisis keberhasilan: telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Terkait Penanganan Pasca Pemanfaatan Bahan Produksi Garam yang Berbahaya Dasar atau Berasal dari Plastik.

Kendala: Penanganan sampah plastik tidak hanya melibatkan petambak garam dan Dinas Perikanan setempat.

Solusi : perlu pelibatan dari stakeholder Lingkungan Hidup untuk menyusun SOP penanganan sampah plastik pasca produksi garam. sosialisasi kepada pelaku usaha dan Masyarakat terkait penanganan sampah plastik.

Analisis Sumber Daya manusia: Melibatkan petambak garam dan pengurus koperasi dan dinas lingkungan hidup untuk penyusunan SOP.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a) Menyusun SOP terkait penanganan pasca pemanfaatan bahan produksi garam yang berbahaya dasar atau berasal dari plastik pada tanggal 22 Februari 2024 di Cirebon, Jawa Barat. Hadir pada pertemuan ini antara lain perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Koperasi Garam, Perwakilan Petambak Garam

- b) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sampah Pasca Pemanfaatan Bahan Produksi Garam yang Berbahan Dasar atau Berasal dari Plastik pada tanggal 21 Maret 2024 di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Narasumber berasal dari Universitas Wiralodra, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Peserta berasal dari Koordinator Penyuluh Perikanan, Perwakilan Petambak Garam, Perwakilan Pembudidaya Ikan, Perwakilan Pengelola Wisata Bahari, Kelompok Usaha Wanita Pesisir.

Rencana aksi triwulan II:

1. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Sumber Daya Perairan untuk Pengusahaan Jasa kelautan.
2. Verifikasi Teknis Pengelolaan Perairan

3.1.8. IKU 8 Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)

Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman, yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan telah menyalurkan bantuan sarana/prasarana mulai dari praproduksi sampai pemasaran.

Pada tahap praproduksi, PUGaR telah menyalurkan bantuan berupa perbaikan saluran irigasi, jalan produksi, dan kolam penampungan air. Pada tahap produksi telah dilakukan pemberian bimbingan teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas petambak garam, integrasi tambak garam, penyusunan informasi geospasial lahan garam, penerapan teknologi pembuatan garam. Dukungan pada tahap pengolahan antara lain pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman, Bimtek pengelola sarana produksi, dan peningkatan kerjasama dan investasi dengan BUMN, BUMD, dan swasta.

Dukungan PUGaR dalam pascaproduksi adalah pembangunan Gudang garam, fasilitasi pembiayaan usaha Gudang penyimpanan garam, pemberian insentif biaya transportasi, pendataan hasil produksi dan stok garam, dan penyusunan neraca komoditas pergaraman. Fasilitasi pengolahan untuk menghasilkan garam berkualitas dilakukan melalui penyediaan mesin pemurnian/pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman. Pengembangan pemasaran meliputi pengembangan sistem informasi komoditas pergaraman berbasis digital dan pengembangan jaringan distribusi pemasaran.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan

melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Penyaluran bantuan sarana/prasarana di kawasan terpadu menjawab kebutuhan petambak garam pada tahap pascaproduksi dan pengolahan. Pada tahun 2024 akan dibangun sarana/prasarana berupa:

- Gudang Garam Rakyat (GGR)
- Rumah Informasi Garam
- Washing Plant
- Gudang Garam Nasional

Tabel 9 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)

SS - 8		Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam											
IKU - 8		Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
5	5	-	Periode pengukuran tahunan				31	100	5	100	5	100	

Pengukuran capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun dilaksanakan secara tahunan. Sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan Renstra.

Analisis **Keberhasilan** pada Triwulan I Tahun 2024, telah dilakukan survei calon lokasi dan calon penerima bantuan

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan sarana/prasarana garam ini dalam penentuan dan penetapan calon lokasi dan calon penerima bantuan.

Solusi yaitu mempercepat penentuan calon lokasi dan calon penerima dengan berkoordinasi dengan Dinas dan kelompok Masyarakat Penerima Bantuan.

Analisis Sumber Daya Manusia : dalam proses perencanaan pembangunan sarana/prasarana melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten.

Kegiatan Pendukung :

1. Penetapan Kepdirjen Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2024
2. Survey Calon Lokasi dan Calon Penerima bantuan sarana/prasarana

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Penetapan lokasi dan penerima bantuan,
2. Kontrak tenaga perencanaan,

2.1.9. IKU 9 Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)

Fasilitasi lahan garam merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam, melalui kegiatan integrasi tambak garam atau revitalisasi lahan garam. Integrasi tambak garam adalah penyatuan tempat dan proses produksi Garam dalam kesatuan hamparan yang utuh paling sedikit seluas 15 (lima belas) hektare. Revitalisasi lahan garam adalah upaya memperbaiki lahan garam dengan penerapan teknologi geomembran, rumah garam, atau skimmer air laut.

Teknik Menghitung dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan luasan lahan garam yang difasilitasi integrasinya dan/atau direvitalisasi lahannya.

SS - 9		Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi											
IKU - 9		Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Periode pengukuran tahunan				75	100	-	-	-	-	

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa IKU Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi ini dihitung secara tahunan dan merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan tidak terdapat dalam Renstra.

Analisi keberhasilan: telah dilakukan survei calon lokasi dan calon penerima bantuan integrasi lahan. Selain itu, telah dimulai penyusunan perencanaan tambak integrasi di Kabupaten Lombok Barat.

Analisis sumberdaya: proses penataan lahan melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dibidangnya.

Hambatan/kendala : Terlambatnya proses penataan lahan garam.

Solusi : Mempercepat proses penataan lahan dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil,

Kegiatan yang telah dilakukan Triwulan I adalah:

1. Penetapan Kepdirjen Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Usaha Pergaraman Tahun 2024.
2. Survei calon lokasi dan calon penerima bantuan integrasi tambak garam di Kabupaten Lombok Barat.
3. Kontrak pekerjaan perencanaan integrasi tambak garam pada bulan Februari 2024.

Rencana Aksi Triwulan II:

1. Finalisasi dokumen perencanaan integrasi tambak garam.
2. akan dilaksanakan juga survei lokasi integrasi tambak garam lainnya yaitu Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan

2.1.10. IKU 10 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. Direktorat Jasa Kelautan mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasaranapengelolaan wisata bahari.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

2.1.11. Tabel 10. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

SS 10		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT											
IKU – 10		Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
17	12	10	-	-	-		8	120 (kinerjaku)	60 (kumulatif)	85	60 (kumulatif)	85	

Capaian IKU pada triwulan I tahun ini Penetapan Desa Wisata Bahari belum ada target dan capaian sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Pada triwulan I dilakukan verifikasi dokumen dan identifikasi lapangan di 6 (enam) lokasi sebagai berikut:

a. Kabupaten Kendal

Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal merupakan salah satu desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari pada tahun 2023. Melihat potensi pengembangan wisata dan ekonomi yang sangat besar dari lokasi tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi pemanfaatan bantuan desa ini akan menerima bantuan keberlanjutan pada tahun 2024. Hasil verifikasi bantuan di lokasi ini adalah sebagai berikut:

- Rencana Pembangunan aula yang berfungsi sebagai pondok informasi dan kedai kuliner lokasi disamping Menara, mengingat , lokasi disebrang jalan milik pribadi perseorangan dengan menebang pohon cemara sekitar 13 pohon
- Pengelola wisata dan desa berkomitmen untuk melakukan penanaman di depan nya (dilahan timbul)
- Rencana luasan 10x10 m
- Akan dibuatkan perencanaan terlebih dulu terkait dengan desainnya



b. Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan hasil identifikasi didapatkan bahwa kebutuhan untuk pengembangan wisata bahari di Desa Batu Belah, Kab. Kepulauan Anambas yang akan dikelola oleh BUMDes Tujuh Kunci adalah sebagai berikut:

- Kapal

Kapal akan digunakan sebagai moda transportasi wisatawan dalam mengunjungi daerah wisata khususnya Pulau Temawan dan pulau lainnya atau digunakan untuk paket mancing.

- Pembangunan dive center

Pembangunan dive center bertujuan sebagai tempat naik dan menurunkan wisatawan. Selain itu juga sebagai tempat penyimpanan berbagai peralatan selam dan kompresor serta pengisian tabung.

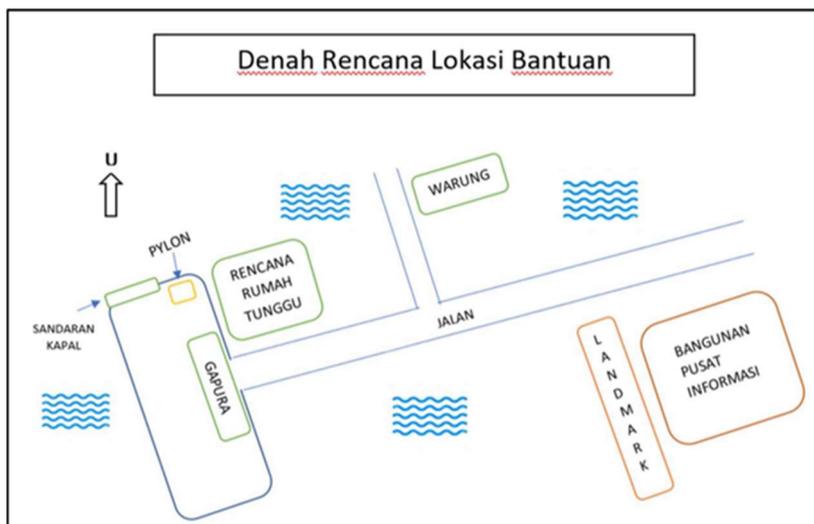
- Alat selam dan Kompresor

Alat selam akan digunakan oleh para pengunjung untuk menikmati keindahan alam laut di kawasan wisata Batu Belah. Selain alat selam, pihak BUMDes

juga mengajukan kompresor untuk kebutuhan pengisian tabung selam.

- Landmark

Landmark dibutuhkan sebagai tugu atau penanda lokasi wisata yang dapat mempercantik daerah wisata. Harapannya Landmark ini menjadi daya tarik dan wisatawan dapat memiliki kenangan foto yang diabadikan di Landmark.



c. Kabupaten Minahasa Tenggara

Desa Tumbak Madani merupakan salah satu desa penerima bantuan sarana wisata bahari berupa alat selam pada tahun 2023 namun belum ditetapkan sebagai Desa Wisata Bahari. Pengelolaan wisata bahari di lokasi tersebut dilakukan oleh BUMDes Sinduri Tumbak Madani. Hasil identifikasi lapang adalah sebagai berikut:

- Potensi Wisata Bahari yang dimiliki Desa Tumbak Madani berupa hutan mangrove (hutan lindung), terumbu karang dan pulau Pontein Tumbak.
- Sarana prasarana wisata berupa Jetsky 1 unit, speedboat 1 unit, alat selam 2 set dan bangunan gazebo dan homestay di pulau Pontein Tumbak yang dibangun Pemkab dan Dana Desa. Sedangkan sarana prasarana penunjang yang tersedia

berupa jalan aspal, jaringan listrik PLN, Jaringan Komunikasi dan sarana air bersih.

- Pengelola adalah BUMDes Sinduri, dengan usaha meliputi Usaha Sewa Home Stay di pulau Pontein Tumbak, Sewa Jetsky, dan sewa speedboat.



d. Kabupaten Pasuruan,

Berdasarkan hasil evaluasi dan proposal yang diusulkan, secara administrasi Desa Penunggul, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu penerima bantuan sarana wisata pada tahun 2024. Sarana wisata bahari yang diusulkan yaitu:

- Gazebo Café dan Gazebo Biasa + Tracking
- Kios Kuliner
- Pylon / Landmark
- Perahu wisata susur mangrove

Peran kelembagaan dan desa, serta BPD, didapatkan cukup aktif, dan wisata mulai tumbuh kembali. Pengelolaan Sampah / Limbah yang di timbulkan akibat aktifitas wisata dan Masyarakat telah didukung dengan dana desa setiap tahun sebesar 36 juta.



e. Kabupaten Demak

Telah dilakukan identifikasi lapang di Desa Tambakbulusan untuk kegiatan wisata bahari yang dikelola oleh BUMDes setempat. Adapun hasil identifikasi adalah sebagai berikut:

- Akses jalan menuju lokasi masih berupa timbunan batu kapur, yang apabila hujan. Beberapa lokasi tergenang
- Sarana wisata sudah cukup pengkap, akan tetapi kelihatan kurang dirawat, meskipun sudah ada pegawai ticketing, kebersihan (menyapu) , tetapi warung kuliner dan area Pantai serta peralatan life jacket tidak dirawat dengan baik
- Usulan bantuan : Tracking, Kawasan parkir dan dermaga, dipertimbangkan mengingat tracking sudah cukup banyak, lapangan parkir masih memadai, dan dermaga dipertimbangkan masih belum sangat dibutuhkan
- Perlu alternatif lain yang mendukung mengembalikan Kawasan wisata dan menambah daya Tarik wisata
- UMKM belum tertata dan terlihat kumuh



Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya survey secara langsung yang juga melibatkan UPT, dinas kabupaten/kota setempat, kepala desa, dan kelompok calon penerima. Survey tersebut juga ditunjang dengan komunikasi intensif melalui media elektronik baik sebelum dan setelahnya.

Kendala utama yang dialami dalam pencapaian target adalah blokir anggaran akibat adanya perubahan RO dan komponen pada dokumen perencanaan anggaran. Namun hal tersebut tidak menghalangi dilakukannya proses identifikasi baik melalui *zoom virtual meeting* dan melakukan koordinasi intensif dengan dinas, desa, dan kelompok pengelola wisata bahari. Terkait pengadaan barang/jasa, beberapa lokasi telah mengajukan dokumen perencanaan.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana identifikasi dilakukan secara online dan koordinasi dilakukan secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok calon penerima.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan aplikasi E-Mancing
2. Bimtek website Desa Wisata Bahari

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024:

1. Pelaksanaan rapat 3 pihak antara Bappenas, DJA dan KKP terkait buka blokir anggaran wisata bahari

2. Penyusunan perencanaan sarana wisata bahari
3. Peningkatan kapasitas pengelola wisata bahari

3.1.11. IKU 11 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan dan pelestarian BMKT untuk dikelola secara baik melalui pemberian bantuan sarana/prasarasannya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di lokasi perairan BMKT/insitu maupun digaleri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri lainnya

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Tabel 11. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)

SS 11		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT											
IKU – 11		Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaian thd target	
2	2	2	-	-	-	-	2	-	2	100	2	100	

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga pada triwulan I ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya survey secara langsung yang juga melibatkan UPT, dinas kabupaten/kota setempat, kepala desa, dan kelompok calon penerima. Survey tersebut juga ditunjang dengan komunikasi intensif melalui media elektronik baik sebelum dan setelahnya.

Kendala utama yang dialami dalam pencapaian target adalah blokir anggaran akibat adanya perubahan RO dan komponen pada dokumen perencanaan anggaran. Namun hal tersebut tidak menghalangi dilakukannya proses identifikasi baik melalui *zoom virtual meeting* dan melakukan koordinasi intensif dengan dinas, desa, dan kelompok pengelola wisata bahari. Terkait pengadaan barang/jasa, beberapa lokasi telah mengajukan dokumen perencanaan.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana identifikasi dilakukan secara online dan koordinasi dilakukan secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok calon penerima.

Kegiatan pendukung BMKT adalah : Pembahasan Pengawasan NSPK BMKT

Rencana aksi Triwulan II Tahun 2024: Pelaksanaan rapat 3 pihak antara Bappenas, DJA dan KKP terkait buka blokir anggaran BMKT,

3.1.12. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Persentase Penyerapan Anggaran

R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran

P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Tabel 12. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU - 12													
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4,45	5,28	96,87%	95%	2,75%	2,75	-	95%	-	-	-	-	-	

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Jasa Kelautan pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 95% dan tercapai 2,75% atau Rp.1.969.061.955,- dari anggaran total Rp.71.477.560.000,-. Pada Triwulan I tahun 2023 persentase realisasi anggaran sebesar 5,28% sehingga apabila dibandingkan maka realisasi Triwulan I tahun 2023 lebih rendah. IKU ini tidak terdapat pada Renstra Sehingga tidak dapat dibandingkan.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU antara Dengan kondisi 1 DIPA di Direktorat Jenderal PRL, masih diperlukan koordinasi yang baik antara Direktorat sehingga terdapat keterlambatan proses administrasi.

Solusi : Melakukan koordinasi intensif antara pengelola keuangan di masing-masing Direktorat/ Sekretariat Ditjen PKRL.yang dilakukan kedepannya agar lebih efektif penggunaan anggaran

Analisis Sumber Daya penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan dibidang penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I antara lain pelaksanaan UP dan TUP, penyelesaian dan monitoring kontrak, pembuatan LPJ bendahara, pembuatan SPM, dan penyelesaian tagihan.

3.1.13. IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuing competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2024 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 13. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

SS 11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan			
IKU – 13	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)			
RealisasiTahun	Tahun 2024	Tahun 2024	Renstra DJPRL2020-2024	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target
	-	-	-	Periode perhitungan Semesteran			88%	-	-	-	-	-

Capaian IKU ini dilakukan semesteran sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan tidak terdapat dalam Renstra.

Analisis Keberhasilan : Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek , sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis)

Kendala: Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Solusi: Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi e-pegawai.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumberdaya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan , Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

3.1.14. IKU 14 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

Tabel 14. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 14		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	81	Penilaian dilakukan Tahunan					81	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP dinilai tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun lalu, Renstra KKP, maupun Renstra DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Jasa Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

Analisis Keberhasilan: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja ""Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)""

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2). Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Jasa Kelautan antara lain

- i. Pelaksanaan Dialog Kinerja Lingkup Ditjen PKRL pada 24-25 Januari 2024 di Bandung yang diikuti dengan Perjanjian Kerja oleh Direktur dan Kepala UPT lingkup Ditjen PKRL.
- ii. Penyusunan Manual IKU, Rincian Target dan Rencana Aksi Kinerja Direktorat.
- iii. Penyusunan laporan kinerja TRW 1 tahun 2024;
- iv. Updating Aplikasi Kinerjaku
- v. Updating E monev Bappenas

3.1.15. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2023. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tabel 15. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

SS 11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan			
IKU – 15	Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (dokumen)			
Realisasi Tahun	Tahun 2024	Tahun 2024	Renstra DJPRL 2020-2024	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan td Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target
4	4	4	1	1	100	-	4	-	4	-	4	-

Capaian IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Kelautan setiap Triwulan. Hingga Triwulan I tersusun 1 dokumen laporan SPIP atau 100%. Capaian IKU ini pada Triwulan I tahun 2024 sama dengan capaian pada Triwulan I tahun 2023 dan IKU ini jika dibandingkan dengan Renstra yang sama setiap tahun yaitu sebanyak 4 dokumen maka masih tercapai 25% pada triwulan I ini.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Jasa Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Jasa Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

3.1.16. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indicator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Cara perhitungan capaian

Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Keaktifan :

Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung X 100%

Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung

Tabel 16. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 16		Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2023		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2021	2022	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
100	100	100	92	133,33	100	+33,33%	92	133,33% atau 120% (kinerjaku)	92	100	92	100	

Capaian IK ini diukur setiap triwulan dengan target pada triwulan I sebesar 92% dengan realisasi sebesar 133,33% dari target. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2023 yang sebesar 100% maka capaian Triwulan I tahun 2024 ini lebih besar 33,33%.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah keaktifan sharing informasi oleh Direktur Jasa Kelautan ke dalam aplikasi pada portal.kkp.go.id.

Kendala: (1). Belum sepenuhnya memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi portal.kkp.go.id, (2). Memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini, dan (3). Melibatkan Staf di Direktorat Jasa Kelautan pada saat sosialisasi penyusunan dan penilaian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait di Direktorat Jasa Kelautan dalam menginput informasi kegiatan dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi yang mudah digunakan yaitu aplikasi portal tanpa perlu mengeluarkan anggaran untuk mengadakan pelatihan.

3.1.17. IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Jasa Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Jasa Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

ΣN_t = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Jasa Kelautan

ΣN = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Jasa Kelautan

Tabel 17. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 17		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
100	100	100	80	91,67	91,67	-8,33	80	91,67	80	-	80	-	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan I tahun 2024 sebesar 120% dengan target 80,00%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2023 yang sebesar 100% maka capaian Triwulan I tahun 2024 adalah ada penurunan sebesar 8,33%. Jika dibandingkan dengan target renstra melebihi sebesar 11,67%.

Terdapat efisiensi pengguna sumberdaya yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kendala : adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini.

Solusi : Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

Kegiatan pendukung pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PRL dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

3.1.18. IKU 18 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Jasa Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan

pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan atas Laporan Keuangan. Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Jaskel yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Jaskel}} \times 100\%$$

Tabel 18. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 18		Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)											
RealisasiTahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi ebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
100	100	Perhitungan dilakukan Tahunan					100	-	100	100	100	100	

Perhitungan persentase penyelesaian temuan dilakukan tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Jasa Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Jasa Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendala : Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Jasa Kelautan", juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

Solusi : Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua koordinator lingkup.

Kegiatan pendukung pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat reviu dan sesudah reviu.

3.1.19. IKU 19 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:

- a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. Inquiring (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan danketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatanprioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL merupakan indikator kinerja baru sebagai implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Tabel 19. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 19		Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)											
RealisasiTahun		Tahun 2024						Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	

100	100	Perhitungan periode Tahunan	100	-	-	-	-	-
-----	-----	-----------------------------	-----	---	---	---	---	---

Capaian Indikator Kinerja ini dihitung tahunan sehingga triwulan I ini belum ada capaian dan belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu maupun renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IK ini yaitu tersalurkannya bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan yang diberikan dalam kondisi baik karena dipelihara dan dijaga, terdapat pencatatan secara rutin, terdapat penambahan alat atau barang untuk menunjang penggunaan bantuan serta mampu memberikan dampak positif bagi kelompok penerima.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif kelompok penerima dan Dinas Perikanan setempat dalam proses penyaluran bantuan, monitoring penggunaan bantuan, dan penambahan peralatan yang diperlukan dalam mendukung operasional pemanfaatan bantuan pemerintah. Kegiatan pendukung antara lain monitoring dari Direktorat Jasa Kelautan dan Dinas perikanan melalui Penyuluh Perikanan dalam proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan. Pemberian bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada kelompok penerima bantuan tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang diberikan.

Kendala : Masih kurangnya kesadaran dari penerima bantuan untuk membuat dan mengirimkan laporan pemanfaatan secara berkala.

Solusi : harus aktif mengingatkan agar penerima bantuan untuk membuat dan mengirimkan laporan secara berkala.

3.1.20. IKU 20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Kelautan akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

Tabel 20. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 20													
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga triwulan I ini belum ada capaian, IKU ini merupakan IKU baru ditahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat dalam renstra.

Analisis keberhasilan: Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PKRL.

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Direktorat Jasa Kelautan mengetahui indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Direktorat Jasa Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.

Kegiatan Pendukung :

1. Mengumpulkan arsip dalam bentuk arsip digital, dan melalui portal KKP.
2. Mengelola arsip dinamis dan statis.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan hingga triwulan I Tahun 2024 adalah **1.969.061.955,-** dari total anggaran **Rp. 71.477.560.000,-** atau sebesar **(2,75%)**. Pada triwulan I ada pagu yang di blokir sebesar **Rp. 9.000.000.000,-**.

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 20243 terdapat 20

indikator yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja (IK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan I semua target IKU dan IK telah tercapai dan ada beberapa capaian yang tidak mencapai target yang telah ditentukan seperti :

1. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 5% tercapai 2,75% atau sebesar 55% belum mencapai target yang telah ditentukan,
2. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
3. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 94% tercapai 133,33% atau sebesar 120%,
4. IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target 80% tercapai 99% atau sebesar 120%.

Rekomendasi Triwulan berikutnya:

1. Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,
2. Rapat percepatan kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,

Lampiran